

**STRATEGI PEMENANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
PADA PEMILU LEGISLATIF 2004**

*(Studi Di Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara)*



Oleh:

**Samad Umarama, S.Ag**  
**06.234.390**

Tesis

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Ilmu Agama Islam Pada Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam**

**YOGYAKARTA**

**2009**

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Strategi yang digunakan dalam meraih dukungan suara yang di gunakan oleh DPD PK Sejahtera Kabupaten Kepulauan Sula adalah perpaduan dari konsep manejmen pemasaran dengan konsep politik yang disesuaikan dengan karakteristik situasi dan kondisi masyarakat Kepulauan Sula, yang bersifat ofensif dan defensif yang bermaksud mencari dukungan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Strategi ofensif ini kemudian dibagi atas dua bagian penting yaitu perencanaan dan implementasi strategi yang merupakan penerapan langsung dari program PK Sejahtera pada pemilu yang terdiri dari direk marketing, gerilya marketing dan logika menjaring massa erta evaluasi dan pengawasan pada pemilu.

Perencanaan yang dilakukan oleh partai ini sebelum menerapkan strategi-strategi politiknya adalah dengan menggunakan dan menerapkan konsep “politik marketing”. Politik marketing adalah serangkaian aktifitas terencana, strategis dan taktis serta berdimensi jangka panjang maupun pendek untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih, tujuannya adalah membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih yang pada akhirnya menjatuhkan pilihannya pada partai tertentu.

Dalam pemahaman partai ini, konsep marketing kemudian diterjemahkan kedalam tiga bagian penting yaitu **positioning, segmentasi dan targetting** partai pada masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan partai dalam memasarkan atau menyebarkan pesan-pesan politik kepada masyarakat, di samping itu langkah-langkah ini di anggap lebih tepat pada sasaran, efektif dan efisien dalam menjangking massa.

Dari strategi tersebut yang paling menonjol dan sangat efektif dalam menjangking massa adalah direct marketing karena strategi ini langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga bisa di ketahui berapa kekuatan nyata yang mendukung PK Sejahtera. Strategi efektif lainnya adalah logika ketokohan. Logika ini sangat ampuh menjangking massa ditengah budaya Kepulauan Sula yang sangat kuat dengan tradisi paternalistik. Kelemahannya sebagai partai baru yang minim tokoh-tokoh potensial yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat lokal disikapi dengan menggandeng dan merekrut tokoh-tokoh tersebut untuk meraih dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat.

Hal strategis lain yang dimiliki PK Sejahtera adalah menunjukkan sikap demokratis dengan tidak menunjukkan Islam secara keras atau fanatik yang berlebihan. Bahkan sebagai partai Islam PK Sejahtera tidak pernah melepaskan isu tentang Negara Islam. Inilah salah satu strategi simpatik yang dibangun oleh partai ini. Islam diterjemahkan secara halus, sopan dan beretika yang sesuai dengan prinsip berpartai yaitu mewujudkan Islam yang rahmatanlillalamin.

Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan strategi PK Sejahtera adalah kader-kader partai yang terdiri dari anak-anak muda yang

memiliki militansi yang tinggi terhadap kerja-kerja dakwah partai. Semangat dan pengorbanan yang tinggi inilah yang menjadi indikator penting jalannya strategi-strategi partai dalam pemilu. Disamping itu pemahaman kader-kader partai terhadap ideologi Islam yang merupakan pedoman hidup dalam berpartai dimaknai secara mendalam bahwa berjuang di medan politik adalah merupakan konsep jihad siyasi. Pemahaman terhadap konsep jihad inilah yang kemudian diimplementasikan dalam aktifitas yang penuh semangat, pengorbanan yang tinggi untuk berjuang yang semata-mata ingin mengharap ridha Allah Swt.

Akhirnya sebagai partai politik yang berasaskan Islam, PK Sejahtera dalam aktifitas dan kegiatan berpartai tetap berpedoman pada ideologinya sebagai dasar atau pijakan dalam berpolitik. Keberhasilan partai dalam menerapkan strateginya pada pemilu lebih didasarkan pada komitmen terhadap ideology, tipologi partai dakwah yang dianutnya, dan konsisten terhadap upaya menegakkan Islam secara universal.

#### **A. Saran**

Salah satu faktor dominant kemenangan PK Sejahtera di Kabupaten Kepulauan Sula karena faktor ketokohan dan faktor agama, karena pada kenyataannya kemenangan partai ini disebabkan karena didukung oleh kaum Muslim dan karena ketokohan para da'i dan ustad yang menjadi kader dan aktifis partai. Oleh karena itu dalam rangka menumbuhkan dan memperkuat posisi partai dengan masyarakat baik skala nasional dan berbasis massa disebuah komunitas masyarakat yang plural maka langkah kongkrit yang harus di ambil oleh PK Sejahtera Kepulauan Sula adalah dengan menggeser secara bertahap loyalitas

pada tokoh menjadi loyalitas pada partai. Dengan pergeseran ini, maka masyarakat akan memfokuskan perhatiannya bukan pada tokoh tertentu tetapi pada partai politik yang menjadi pilihannya.

Peningkatan suara PK Sejahtera pada pemilu 2004 terjadi karena adanya harapan-harapan baru dari masyarakat, dan kekecewaan terhadap partai-partai Islam yang telah banyak berbuat kecewa masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang hanya mementingkan kepentingan elit. Oleh karena itu kedepan PK Sejahtera harus mampu mewujudkan janji-janji politiknya selama masa kampanye. Jika tidak dilakukan, maka PK Sejahtera hanya akan mengulangi cerita lama tentang masyarakat yang kecewa karena salah menitipkan aspirasinya pada partai politik.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 tidak saja membuka peluang kebebasan bagi kehidupan politik bangsa Indonesia, tetapi juga menumbuhkan hasrat para tokoh politik, agamawan, pengusaha, dan kalangan intelektual untuk menggapai kekuasaan melalui partai politik. Pengekangan kebebasan mendirikan partai politik selama puluhan tahun tidak dapat lagi dipertahankan. Kehidupan politik pun memasuki babak baru yang penuh gairah. Praktis hanya dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sejak runtuhnya Orde Baru, sebanyak 181 partai politik bermunculan dan menyatakan kesiapannya mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu).<sup>1</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, memang hanya 48 partai politik yang dinyatakan berhak mengikuti ritual pesta demokrasi, Pemilu 1999. Di antara keempat puluh delapan (48) partai politik peserta Pemilu 1999, terdapat Partai Keadilan (PK) yang merupakan salah satu partai politik berasaskan Islam. Ali Said Damanik mencatat bahwa PK adalah satu-satunya partai politik yang memiliki keunikan karena didukung oleh pendukung muda, intelektual muda, dan berasal dari lingkungan penganut Islam.<sup>2</sup> Proses lahirnya partai ini sangat terkait

---

<sup>1</sup>Bambang Setiawan dan Bastian Nainggolan (eds.), *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. vii.

<sup>2</sup>Damanik mencatat bahwa terdapat 181 partai politik berdiri pada saat reformasi dan menyatakan siap mengikuti kontes dalam Pemilihan Umum 1999, meskipun dalam perkembangannya tereduksi menjadi 48 partai yang berhak mengikuti Pemilu setelah melalui

dengan pertumbuhan aktivitas dakwah Islam sejak awal tahun 1980-an yang merebak di kalangan aktivis dakwah kampus. Didirikan oleh sekumpulan anak muda yang giat mengadakan pengajian di masjid-masjid kampus, partai ini kemudian tampil menjadi kekuatan politik yang mulai diperhitungkan, karena menjadi salah satu di antara tujuh partai Pemilu 1999 yang memperoleh suara cukup signifikan. Meski termasuk salah satu dari tujuh partai yang memperoleh suara cukup signifikan pada Pemilu 1999, perolehan suara PK yang hanya mencapai 1,36%, menjadikan partai ini dinyatakan tidak lolos persyaratan *electoral threshold* (seperti ditetapkan Komisi Pemilihan Umum/ KPU), yaitu suatu persyaratan yang menjadikan suatu partai berhak mengikuti Pemilu selanjutnya (Pemilu 2004). Akibat pemberlakuan *electoral threshold* ini, di mana batas minimal adalah 2 % atau 10 kursi di DPR, seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, PK tidak bisa lagi mengikuti Pemilu 2004. Sebagai solusi untuk mengikuti Pemilu 2004, jajaran pengurus dan kader partai melakukan langkah antisipatif dengan mengganti nama partai, yaitu dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS atau PK Sejahtera). Metamorfosis dari PK ke PK Sejahtera ini hanya pada tataran simbol dan identitas di permukaan, karena pada kenyataannya, PK Sejahtera tetap saja tidak berbeda dengan PK baik secara ideologis maupun cita-cita politiknya.

Sejak awal kemunculannya baik ketika masih menjadi PK maupun PK Sejahtera, partai ini dinilai banyak pengamat akan menjadi prototip partai masa depan. Namun demikian, tidak sedikit pula yang meragukan bahwa partai ini akan

---

proses verifikasi. Lihat, Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. xxiii.

mendulang sukses pada Pemilu-pemilu mendatang. Alasannya adalah karena partai ini didasarkan pada ideologi agama (baca: Islam) yang pada gilirannya akan memiliki pengikut massa (konstituen) dari komunitas Muslim tertentu sehingga tampak eksklusif dan cenderung radikal. Memang, pesimisme yang disampaikan sebagian kalangan itu masih memerlukan pembuktian secara konkret. Akan tetapi, keberhasilan perolehan suara PK Sejahtera pada Pemilu 2004 adalah bukti awal bahwa PK Sejahtera tidak seperti yang diperkirakan. Pada Pemilu 2004, perolehan suara PK Sejahtera secara umum mengalami peningkatan sebesar 5% dibanding pada Pemilu 1999.

Pada tingkat lokal/daerah Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara, perolehan suara PK Sejahtera pada Pemilu 2004 juga meningkat cukup besar, yaitu 5.341 suara dari 73.000 suara pemilih yang terdaftar dan berada di urutan ketiga setelah Partai Golkar dan PDIP. Perolehan suara ini jauh lebih besar dibandingkan pada Pemilu 1999, yang hanya 1.017 suara dan berada di urutan kelima setelah Partai Golkar, PDIP, PPP, dan PAN.<sup>3</sup> Dari kenaikan sekitar 34,4% ini, PKS berhasil mengirimkan tiga wakilnya menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dan 1 orang di DPRD Propinsi<sup>4</sup>.

Tabel 1.  
Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu pada  
Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Kepulauan Sula

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi DPRD TK II
1.	Partai Bulan Bintang	3093	1

<sup>3</sup>Sumber: KPU Propinsi Maluku Utara dan DPW PKS Propinsi Maluku Utara.

<sup>4</sup>Sumber: DPD PKS Kabupaten Kepulauan Sula, dan DPW PKS. Propinsi Maluku Utara



2	Partai Merdeka	191	-
3	Partai Persatuan Pembangunan	3755	2
4	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1083	-
5	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	70	-
6	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	92	-
7	Partai Demokrat	2196	1
8	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2779	1
9	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1699	-
10	Partai Amanat Nasional	2345	1
11	Partai Karya Peduli Bangsa	1596	1
12	Partai Kebangkitan Bangsa	3332	1
13	Partai Keadilan Sejahtera	5341	3
14	Partai Bintang Reformasi	3544	1
15	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9136	5
16	Partai Golongan Karya	19368	8
17	Partai Serikat Indonesia	763	-
18	Partai Pelopor	560	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>60943</b>	<b>25</b>

*Sumber:* Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 5 April 2004 oleh KPU Kab.Kepulauan Sula.

Dari data perolehan suara di atas dapat dipahami bahwa perolehan suara PKS mengalami peningkatan yang sangat besar. Ada beberapa fenomena yang perlu dicermati mengenai peningkatan suara PK Sejahtera Kabupaten Kepulauan

Sula. *Pertama*, PK Sejahtera merupakan partai yang relatif baru; belum memiliki basis massa yang kuat, tetapi pada kenyataannya mampu meraih dukungan konstituen yang besar dan mengungguli suara partai-partai besar dan lama. *Kedua*, sebagai partai yang terdiri dari kaum intelektual muda, banyak pihak menilai bahwa basis dukungan PK Sejahtera adalah masyarakat urban yang terdiri dari kalangan Islam kota terdidik. Terdapat pengecualian untuk membuktikan pendapat ini, karena justru dukungan PK Sejahtera di Kabupaten Kepulauan Sula sebagian besar berasal dari daerah yang tergolong bukan daerah perkotaan dan tingkat pendidikan masyarakatnya tidak terlalu tinggi. *Ketiga*, dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM), PK Sejahtera minim dukungan tokoh-tokoh berpengaruh terhadap masyarakat. PK Sejahtera Kabupaten Kepulauan Sula sebagian besar terdiri dari intelektual muda yang sama sekali baru dalam konfigurasi politik, terutama di tingkat lokal Kabupaten Kepulauan Sula.

Sejalan dengan fenomena di atas, Joko Prihatmoko menyatakan bahwa ada beberapa hal yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh sebuah partai politik, yaitu belum memiliki jaringan yang kuat, konsolidasi yang tertata rapi, keterbatasan sumber daya (manusia dan dana), sebagian besar tokoh-tokoh partai baru belum mengakar di masyarakat (*grassroot*) karena tokoh-tokoh yang telah lama mengakar sudah terserap ke partai-partai besar. Selain itu, mereka belum memiliki pengalaman yang banyak, kesabaran, dan kepiawaian dalam politik serta belum memiliki basis pemilih yang jelas.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Joko Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang: LP2L, 2004), hlm. 145.

Kenyataan di atas jika dibandingkan dengan fenomena peningkatan suara PK Sejahtera maka dapat dikatakan bahwa PK Sejahtera adalah sebuah pengecualian serta merupakan fenomena yang menarik yang perlu dicermati pada saat partai-partai politik lama justru mengalami krisis dukungan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula pada Pemilu 2004.

Penelitian ini berusaha mengkaji dan menganalisis strategi kemenangan PK Sejahtera pada Pemilu Legislatif 2004. Alasan mengapa PK Sejahtera dipilih sebagai unit analisis adalah *pertama*, PK Sejahtera adalah partai baru, tetapi mampu meraih suara terbanyak ketiga di Kabupaten Kepulauan Sula setelah Partai Golkar dan PDIP. *Kedua*, partai ini didominasi oleh kalangan muda dan tokoh-tokoh yang kurang berpengaruh dalam masyarakat, tetapi pada kenyataannya mampu meraih dukungan yang luas. *Ketiga*, dari asumsi sederhana yang penulis bangun, ada hubungan antara perolehan suara PK Sejahtera dan konflik horizontal yang terjadi di Maluku Utara, Khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula sepanjang tahun 1999 hingga 2003. Dari data hasil Pemilu 2004, ada kaitan antara daerah yang dilanda konflik dan kemenangan PK Sejahtera. Daerah-daerah yang bersentuhan langsung dengan konflik atau gejolak konflik yang tinggi maka perolehan suara PK Sejahtera mengalami peningkatan yang cukup besar. Indikatornya adalah, Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Kepulauan Sula (daerah pemekaran) yang merupakan daerah yang dilanda konflik horizontal dan bersifat laten. Daerah-daerah ini jika dilihat dari perolehan suara, PK Sejahtera berhasil memperoleh kursi di DPRD Propinsi, sedangkan kabupaten-kabupaten lain yang daerah konfliknya rendah dan tidak

berhubungan langsung dengan dampak konflik maka perolehan suara PKS tidak mengalami peningkatan yang besar. Hal ini tampak di Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Kota Tidore di mana PK Sejahtera tidak mempunyai wakil di DPRD Propinsi bahkan hanya memperoleh satu kursi di DPRD Kabupaten/ Kota, itu pun diperoleh melalui sisa suara.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari enam kecamatan yang tersebar di tiga pulau, yaitu Pulau Sula Besi, Mangole, dan Taliabu. Kabupaten ini terdiri dari 123.907 jiwa (73.000 jiwa di antaranya mempunyai hak pilih), 79 Desa, 12 suku/ etnis, (dalam bahasa masyarakat Maluku Utara suku/ etnis ini disebut dengan sangadji (penguasa). Setiap suku merasa lebih dominan dari yang lain dalam berbagai aktivitas masyarakat dan juga merasa bahwa memiliki kemampuan Sumber Daya Manusia yang lebih baik. Faktor ini juga yang merupakan salah satu pemicu konflik dan kekerasan antarkelompok sebelum dan sesudah pemekaran wilayah, yang puncaknya terjadi pada 11 Desember 2003, yang mengakibatkan beberapa orang tewas dan yang lainnya luka berat. Selain itu, terjadinya tragedi berdarah, konflik horizontal di Maluku (Ambon) tahun 1999, dua hari kemudian terjadi pula konflik yang sama di Sanana (Kabupaten Kepulauan Sula sebelum pemekaran) yang mengakibatkan seorang jaksa bersama keluarganya serta beberapa warga lainnya meninggal dunia, di samping tiga buah gereja besar rusak total.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, persoalan mendasar yang berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemenangan PKS Kabupaten Kepulauan Sula pada Pemilu Legislatif 2004? Persoalan ini dianalisis melalui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar strategi pemenangan PK Sejahtera di Kabupaten Kepulauan Sula?
2. Bagaimana implementasi strategi pemenangan PK Sejahtera di Kabupaten Kepulauan Sula pada Pemilu Legislatif 2004?
3. Bagaimana prospek PK Sejahtera pada masa yang akan datang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi pemenangan yang ditempuh PKS Kabupaten Kepulauan Sula pada Pemilu Legislatif 2004. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh tentang sejarah perkembangan PK Sejahtera (sejak masih menjadi PK) di Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan secara teoretis dan praksis strategi pemenangan PK Sejahtera pada Pemilu Legislatif 2004.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu politik, khususnya mengenai strategi partai politik

dalam Pemilu dan demokrasi di aras lokal, serta menjadi rujukan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan *platform* partai, terutama terhadap partai-partai berbasis agama (Islam).

#### **D. Telaah Pustaka**

Dari hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa karya/ buku yang mengkaji Partai Keadilan Sejahtera, di antaranya pertama, karya Yon Machmudi yang berjudul *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*.<sup>6</sup> Buku ini secara mendasar mengilustrasikan PKS dari awal perkembangannya hingga menjadi partai yang berhasil pada Pemilu 2004. Machmudi mengkritik kategorisasi-kategorisasi yang lama tentang Islam Indonesia yang tidak memadai lagi dalam menggambarkan PK Sejahtera dan munculnya gerakan Tarbiyah. Selanjutnya, Machmudi menambahkan tipologi santri dalam tiga aliran, konvergen, radikal, dan global. Terkait dengan penelitian ini, Machmudi tidak secara spesifik mengulas strategi kemenangan PKS pada Pemilu 2004 secara praksis, hanya saja Machmudi menggambarkan tentang strategi kultural yang dilakukan PK Sejahtera, yakni melalui dakwah-dakwah kampus, pengajian, dan solidaritas kemanusiaan. Adapun strategi politik (pemenangan) yang terkait langsung dengan Pemilu tidak banyak disinggung, untuk tidak mengatakan tidak sama sekali.

---

<sup>6</sup>Yon Mahmudi, *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Cet. 2 (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006).

Kedua, buku karya Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*.<sup>7</sup> Secara ideologi-politik, Furkon mensinyalir adanya hubungan geneologis antara PK Sejahtera dan Ikhwanul Muslimin yang berkembang di Mesir, terutama dari segi pemikirannya. PK Sejahtera banyak dipengaruhi oleh pemikiran Hasan Al-Banna, tokoh kunci Ikhwanul Muslimin.

Ketiga,. Buku yang ditulis oleh Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Buku ini lebih banyak bercerita tentang sejarah kelahiran PK Sejahtera, terutama pada transformasi gerakan tarbiyah di Indonesia yang banyak terdapat di kampus-kampus negeri – ITB, UI, UGM, dan lain-lain – sebagai embrio kelahiran partai. Keempat, Buku yang ditulis oleh Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah: Konsep dan Praktek Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*<sup>8</sup> Buku ini mengulas dinamika dan konstalasi politik nasional di Indonesia, khususnya politik Islam pada masa transisi 1998-2004. buku ini juga mengungkapkan bahwa Islam politik tetap eksis dimasa transisi, Sapto Waluyo lewat buku ini menegaskan bahwa ditengah konstalasi masa transisi masih ada setitik bintang kian berkilau Itulah politik dakwah yang diusung kalangan aktifis muda Muslim yang sebelumnya telah intens mengkaji norma-norma religius dan kaitatnya dengan tuntutan kehidupan yang lebih luas. Dari halaqah (lingkaran studi) sebagai motor utama tarbiyah (proses edukasi) itulah, mereka melakukan lompatan sejarah

---

<sup>7</sup>Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi dan Praksis Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Cet, 1 (Jakarta: Teraju, 2004).

<sup>8</sup>Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah: Konsep dan Praktek Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*, Cet, 1 (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005).

:membentuk partai politik. Partai Keadilan (PK) kemudian berubah namanya menjadi PK Sejahtera (PKS) menjadi harapan baru bagi umat dan bangsa, asset sejarah yang akan terus diuji konsistensi dan konstribusi positifnya bagi keummatan, kebangsaan dan kemanusiaan.

Untuk penelitian yang secara khusus mengkaji PK Sejahtera dalam wilayah politik lokal Kabupaten Kepulauan Sula dan kaitannya dengan strategi pemenangan partai, sejauh ini penulis belum menemukannya sehingga penelitian ini merupakan pertama tentang kiprah PK Sejahtera di Kabupaten Kepulauan Sula.

## **E. Kerangka Teori**

Untuk membahas dan menganalisis permasalahan di atas secara menyeluruh maka dibutuhkan dasar-dasar teori yang memadai. Dasar-dasar teori itu meliputi strategi politik, tipologi partai politik, basis sosial, dan teori persaingan partai.

### *1. Strategi Politik*

Berpikir dan bertindak dengan menggunakan strategi merupakan suatu keharusan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah diinginkan. Tanpa strategi, mustahil sebuah tujuan akan tercapai secara maksimal. Dalam konteks ini, strategi jelas diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Tak terkecuali dalam politik, strategi merupakan komponen penting dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan politik yang telah ditentukan



oleh sekelompok orang. Dalam bagian ini, dibahas mengenai pengertian strategi, jenis-jenis strategi politik yang digunakan dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan, kaitannya dengan strategi dalam upaya peningkatan suara partai politik dalam Pemilu.

Gatot Widayanto dalam Dody Rudianto<sup>9</sup> menyatakan bahwa asal mula munculnya "strategi" berawal dari lingkungan militer, sekitar 500 tahun SM. Jenderal Sun Tzu mengartikan "strategi" sebagai salah satu cara untuk dengan mudah menaklukkan lawan, kalau perlu tanpa pertempuran, atau dengan kata lain strategi diperlukan jika ada lawan. Faudy Tjiptono<sup>10</sup> menyebutkan bahwa istilah "strategi" itu sendiri berasal dari bahasa latin Yunani, *strategia*, yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini jelas sesuai dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang, di mana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar selalu dapat memenangkan peperangan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa "strategi" pada zaman dahulu merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan dunia militer, khususnya dalam kaitannya dengan perang. Dalam perkembangannya, dan sesuai perubahan yang terjadi dalam masyarakat, istilah "strategi" mengalami perluasan makna. Pengertiannya pun semakin disesuaikan dengan perubahan dan tuntutan zaman.

Dalam konteks sejarah, kata "strategi" baru dikenal atau diperlukan dalam dunia ekonomi setelah era industrialisasi, yaitu munculnya strategi perusahaan yang diperlukan dalam kepemimpinan terencana atas orang-orang dalam satu

---

<sup>9</sup>Dody Rudianto dan Budy Sudjijono, *Manajemen Pemasaran Partai Politik*, (Jakarta: Citra Mandala Pratama, 2003), hlm. 16.

<sup>10</sup>*Ibid.*,

perusahaan.<sup>11</sup> Sejak saat itu, secara perlahan pengertian "strategi" semakin diperluas bagi segala aspek kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi dipahami secara sempit dalam bidang militer saja. Perluasan makna "strategi" tentu saja semakin dikenal oleh berbagai kalangan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam konteks ini, kalangan pebisnis dan politisi pun tak ketinggalan untuk menggunakan strategi dalam aktivitasnya. Dalam dunia politik misalnya, orang lalu menyebut strategi politik, begitu juga dalam dunia bisnis maka penyebutannya pun akan menyesuaikan. Dalam dunia politik, politisi menggunakan strategi politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Akan tetapi, cara menerapkan strategi politik berbeda dalam konteks strategi militer.

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik.<sup>12</sup> Begitu pentingnya penerapan strategi sehingga setiap kelompok masyarakat mau tidak mau harus mampu bersaing menyusun sebuah strategi politik yang mampu memberikan kemenangan. Karena, tanpa strategi politik, kekuasaan yang merupakan tujuan utama berpolitik tidak akan pernah terwujud. Dalam konteks manajemen, strategi dikenal dengan istilah *manajemen-strategic*. Selain itu, telah diadopsi pula prinsip-prinsip manajemen pemasaran yang dalam implementasinya digunakan oleh organisasi partai politik, terutama dalam kerangka berpikir strategi pemasaran. Akibatnya, istilah-istilah pemasaran pun telah lekat dalam konteks strategi dalam dunia politik. Beberapa pendekatan yang

---

<sup>11</sup>Peter Schroder, Strategi Politik, (Jakarta: Nomos baden-baden, 2000), hlm. 8.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

menggunakan kerangka berpikir strategi pemasaran atau *political-marketing* yang juga telah dipakai dalam strategi politik, antara lain:<sup>13</sup>

a. Segmentasi

Segmentasi adalah pemilihan kelompok orang yang dengan suatu cara yang sama memberikan tanggapan terhadap seperangkat rangsangan pemasaran tertentu. Jelasnya, segmen adalah suatu kelompok yang mempunyai tanggapan yang sama. Partai politik pun sudah banyak yang tidak lagi menganut pemasaran secara massal, tetapi menggunakan segmentasi pasar agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Segmentasi sendiri dapat dibagi ke dalam empat kategori:

- 1) Segmentasi geografik, yaitu pembagian pasar menjadi unit-unit geografis, seperti suku, ras, propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan desa, dan dusun.
- 2) Segmentasi demografik, yaitu suatu pemilahan pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografi, misalnya jenis kelamin, umur, agama, suku, profesi, pendidikan, dan sebagainya.
- 3) Segmentasi psikografis, yaitu konstituen dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, sifat, atau kepribadian.
- 4) Segmentasi perilaku, yaitu konstituen dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, tanggapan, manfaat, status, kesetiaan, kesiapan, perhatian terhadap kemanusiawian, dan sebagainya.

---

<sup>13</sup>Badjoeri Widagdo, *Manajemen Pemasaran Partai Politik Menangkan Pemilu*, (Jakarta: P.T.Gunung Agung, 2004), hlm. 66.

Segmentasi pada dasarnya bertujuan untuk mengenal lebih jauh kelompok-kelompok pasar (pemilih) yang berguna untuk mencari peluang, menggerogoti segmen pemimpin pasar, merumuskan pesan-pesan komunikasi, melayani dengan baik, mendesain produk, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Untuk menetapkan segmen-segmen yang menjadi sasaran, terdapat tiga pilihan strategi yang sering digunakan untuk menggarap segmen-segmen pasar yang telah dilakukan. Ketiga strategi itu antara lain:<sup>15</sup>

- 1) Strategi pemasaran serba-sama (*undifferentiated-marketing*), yaitu strategi yang diterapkan dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan setiap segmen. Strategi ini bertujuan untuk meraih pemilih sebanyak mungkin dengan merancang suatu program pemasaran guna membidik sebagian besar pemilih.
- 2) Strategi pemasaran serba-aneka (*a differentiated marketing strategic*), yaitu merancang beberapa program pemasaran untuk segmen-segmen yang berbeda. Dengan cara ini diharapkan suatu partai peserta Pemilu memiliki posisi yang kuat di setiap segmen. Strategi ini efektif jika program-program itu diikat suatu benang-merah yang membentuk persepsi bahwa secara umum partai menawarkan program besar yang sama dan konsisten pada setiap segmen meskipun dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu.

---

<sup>14</sup>Adman Nursal, *Political Marketing*, (Jakarta: P.T.Gramedia pustaka utama , 2004), hlm. 110.

<sup>15</sup>Kotler and Armstrong dalam Adman Nursal, *Ibid*, hlm. 159.

- 3) Strategi pemasaran-terpusat (*concentrated marketing strategic*), yaitu strategi yang digunakan untuk membidik satu atau beberapa segmen pasar. Prinsipnya, lebih baik merangkul bagian pasar yang luas dari satu atau sejumlah segmen daripada memperoleh pasar yang sedikit dari segmen pasar yang luas.

Strategi mana yang dipilih tergantung pada posisi partai, antara lain berkaitan dengan sumber daya partai, tahap siklus hidup partai, para pesaing, dan sebagainya.

#### b. *Targetting*

*Targetting* adalah pemilihan (fokus) pada suatu segmen tertentu yang ingin dicapai (digarap secara intensif untuk diraih sebagai pendukung utama partai). Dengan kata lain, *targetting* adalah keputusan untuk membidik suatu kelompok konstituen tertentu yang diperkirakan sangat mudah diraih.<sup>16</sup> Sebelum menentukan target, hal yang perlu dilakukan sebelumnya adalah dengan memahami terlebih dahulu wilayah pemilihan. Perlu juga dianalisis sebaran pemilih secara geografis dan bagaimana cara mendekati para pemilih secara efektif dan efisien.

Dalam konteks di atas, masing-masing partai politik sudah seharusnya memiliki kelompok target tertentu yang harus digarap agar menjadi pendukung utama dalam Pemilu. Misalnya, PKB dengan *captive-market*-nya dari warga NU, kemudian PAN dengan *captive-market*-nya anggota Muhammadiyah, dan PDIP dengan *captive market*-nya dari kalangan

---

<sup>16</sup>Rudiyanto, Manajemen Pemasaran Partai..., hlm. 21.

nasionalis-abangan, kelas menengah ke bawah atau yang biasa disebut *wong cilik*.<sup>17</sup>

c. *Positioning* (Penentuan Posisi)

Dalam ilmu politik, *positioning* adalah usaha pesan politik atau menjejalkan sesuatu mengenai sebuah partai politik ke dalam konstituen dan atau calon konstituen. *Positioning* juga berarti strategi komunikasi untuk menanamkan citra tertentu kepada satu atau beberapa kelompok pemilih. Penentuan posisi ini dimaksudkan untuk menempatkan sebuah partai politik dalam keberadaan yang berbeda terhadap posisi partai-partai politik yang lain, atau dengan kata lain bagaimana memosisikan kedudukan partai politik agar dapat diterima, harus diungkapkan dalam pernyataan yang mudah, enak didengar, dan dapat dipercaya dalam sebuah komunitas masyarakat yang akan dijadikan target. Penggunaan simbol-simbol atau jargon politik dimungkinkan dalam upaya menarik simpati massa. Di samping itu, mengasumsikan diri sebagai partai yang mewakili kelompok tertindas atau partai yang mengusung tema-tema perjuangan, seperti penegakan hukum, pejuang keadilan, ataupun partai yang menghimpun komunitas beragama, juga merupakan taktik dalam upaya menentukan posisi. Kejelasan posisi bagi partai politik menjadi sesuatu yang sangat penting, karena dengan posisi yang jelas maka para pemilih akan lebih mudah mengenal dan memahami maksud dari perjuangan partai yang

---

<sup>17</sup>Widagdo, Manajemen Pemasaran Partai ..., hlm. 69.

disampaikan melalui janji-janji politiknya. Adapun jenis-jenis posisi partai politik, antara lain:<sup>18</sup>

- 1) Posisi partai berdasarkan kategori partai tersebut. Misalnya, sebuah partai memosisikan dirinya sebagai partai "nasionalis-religius", akan tetapi posisi ini terlalu umum sehingga tidak akan muncul perbedaan bagi para pemilih jika dibandingkan dengan partai nasionalis-religius lainnya.
- 2) Posisi partai berdasarkan atribut tertentu. Misalnya, sebuah partai menyatakan dirinya sebagai partai besar yang memiliki sumber daya yang besar yang bisa dikerahkan untuk mewujudkan janji-janji politiknya kepada masyarakat.
- 3) Posisi partai berdasarkan benefit, di mana partai akan memberikan citra tertentu yang akan memberikan pendidikan gratis, atau partai yang memperjuangkan nasib kaum-kaum tertentu.
- 4) Posisi partai berdasarkan kategori pemilih. Misalnya, partai memosisikan dirinya sebagai partai *wong cilik* atau partai-partai kelompok sosial tertentu.

Beberapa partai politik yang menggunakan cara ini, seperti PPP, PBB, PBR, dan PKS adalah partai-partai yang mencoba memosisikan dirinya sebagai partainya umat Islam. PDIP menegaskan dirinya sebagai partai kaum nasionalis dan atau penggunaan tema-tema keadilan dan kesejahteraan yang sering digunakan oleh beberapa partai untuk mencari simpati dari masyarakat.

---

<sup>18</sup>Adman Nursal, *Political Makceting...*, hlm. 155.

Dari posisi yang sudah diambil oleh masing-masing partai politik, bisa digunakan beberapa kombinasi strategi untuk meraih simpati masyarakat luas.

Strategi posisi tersebut antara lain:

- 1) Strategi penguatan (*reinforcement strategy*), yaitu strategi yang digunakan oleh sebuah partai politik/kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu, dan citra tersebut dibuktikan melalui kinerja politik selama mengemban jabatan politik tertentu.
- 2) Strategi rasionalisasi (*rationalization strategy*), yaitu strategi yang dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih partai politik tertentu karena sebelumnya telah berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih, akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.
- 3) Strategi bujukan (*inducement strategy*), yaitu strategi yang digunakan oleh partai politik yang mempersepsikan dirinya memiliki citra tertentu dan memiliki kinerja atau atribut-atribut yang cocok dengan citra lainnya.
- 4) Strategi konfrontasi (*confrontatiaon strategy*), yaitu strategi yang diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih partai politik dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih dan kemudian partai politik tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih.

Selain itu, dalam konteks strategi politik, merupakan upaya partai politik untuk menggunakan cara-cara atau strategi untuk mencapai cita-cita politik.

Untuk mencapai cita-cita politik dimaksud, Peter Schroder <sup>19</sup> membagi strategi

---

<sup>19</sup> Schroder, *Strategi Politik..*, hlm. 104.



ke dalam dua bagian, yakni strategi ofensif (menyerang) dan strategi defensif (bertahan). Strategi ofensif bisa berupa strategi untuk memperluas pasar dan atau strategi untuk menembus pasar. Sementara strategi defensif menyangkut strategi untuk mempertahankan dan strategi untuk menutup atau menyerahkan pasar.

- 1) Strategi ofensif, (menyerang), yaitu apabila sebuah partai politik ingin meningkatkan jumlah pemilihnya atau ingin meningkatkan perolehan suaranya. Untuk menjalankan strategi ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pandangan positif terhadap partai sehingga kampanye dapat berhasil. Pada dasarnya, model strategi ini lebih ditujukan pada adanya perbedaan-perbedaan yang jelas dan menarik antara partainya dan partai politik yang lain, yang tujuannya untuk mengambil alih pemilihnya. Artinya, bahwa mereka harus mampu menunjukkan perbedaan terhadap keadaan yang berlaku pada saat itu beserta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan darinya.

- a. Strategi Perluasan Pasar

Dalam kampanye Pemilu, strategi perluasan pasar yang ofensif bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru di samping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu, harus ada penawaran baru atau penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih partai pesaing. Jadi, yang menjadi fokus di sini adalah strategi persaingan yang faktual di mana berbagai partai bertarung untuk kelompok pemilih dalam sebuah kompetisi.

Strategi seperti ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye pengantar untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru apa saja dan penawaran mana saja yang lebih baik dibandingkan dengan penawaran partai-partai lain. Dalam implementasi politik, produk baru yang ditawarkan adalah politik baru atau lebih tepatnya, keuntungan yang dihasilkan politik baru perlu diiklankan. Untuk itu, politik pertama-tama harus dirumuskan secara jelas. Politik yang belum selesai sama tidak menariknya dengan produk yang belum selesai. Produk atau politik semacam ini membutuhkan nama yang baru, diskripsi baru, dan keuntungan baru yang ditawarkan. Jika diinginkan, juga sebuah kemasan baru yang dihubungkan dengan individu-individu baru. Pertentangan internal partai perlu segera diatasi sebelum dilakukan kampanye terbuka atas politik tersebut.

b. Strategi Menembus Pasar

Merupakan strategi penggalan potensi secara optimal, atau penggalan bagian yang dimiliki sekelompok target di mana keberhasilan telah diraih sebelumnya. Tujuan yang dimiliki, misalnya, adalah diperolehnya hasil yang lebih baik dalam sebuah kelompok target (misalnya, sebelumnya hanya 30%, sekarang harus menembus 50%). Hal ini menyangkut pemasaran program yang di miliki secara lebih baik dan peningkatan intensitas keselarasan antara program dan individu. Seperti halnya

memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok target, bagi organisasi ini berarti: *pertama*, peningkatan motivasi multiplikator dan pemegang jabatan melalui iklan keuntungan yang ditawarkan secara lebih baik. *Kedua*, pemanfaatan jalur komunikasi yang baru. *Ketiga*, perbaikan argumentasi melalui pembinaan. *Keempat*, penggerakan emosi kelompok target dengan memanfaatkan iklim/keadaan tertentu atau dengan menciptakan gambaran musuh bersama (*common enemy*).

- 2) Strategi defensif, (bertahan) yaitu apabila partai politik yang berkuasa atau koalisi pemerintahan ingin mempertahankan mayoritasnya, atau jika pangsa pasar (politik) hendak dipertahankan. Strategi ini juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau akan ditutup, dan penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan yang sebesar-besarnya.

- a. Strategi Mempertahankan Pasar

Strategi ini merupakan strategi yang khas untuk mempertahankan mayoritas pemerintah. Dalam hal ini, partai akan memelihara pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman pemilih musiman mereka sebelumnya akan situasi yang sedang berlangsung. Terhadap partai oposisi yang menyerang partai, pemerintah akan berusaha mengaburkan perbedaan yang ada dengan membuat perbedaan tersebut tidak dapat dikenali lagi. Partai yang ingin mempertahankan pasar akan memilih sikap yang

bertentangan dari partai yang menerapkan strategi ofensif. Apabila yang satu ingin menonjolkan perbedaan yang ada untuk memberikan penawaran yang menarik, maka partai-partai yang menerapkan strategi defensif justru menginginkan agar perbedaan yang ada tidak dikenali. Dalam hubungannya dengan multiplikator dan aliansi, partai-partai yang menerapkan strategi defensif menjalankan sebuah pemeliharaan secara intensif terhadap multiplikator yang ada serta menawarkan insentif kepada mereka. Data tentang keberhasilan yang diperoleh disebarluaskan di lingkungan sekitar, investasi terutama dilakukan dalam bidang kehummasan. Dalam organisasi, proses semakin dipermudah, rutinitas dikembangkan, dan dengan demikian pengeluaran ditekan.

b. Strategi menyerahkan pasar

Strategi menyerahkan pasar dapat memiliki dua arti. *Pertama*, partai ingin menyerah dan dalam keadaan tertentu melebur ke partai yang lain (koalisi). *Kedua*, dalam Pemilu yang menggunakan balot, di mana ada tahap pemungutan suara yang diikuti oleh kandidat-kandidat terkenal dalam Pemilu tahap pertama. Namun, jika para kandidat harus menyerahkan pasarnya maka harus mempertegas ketidakikutsertaan mereka dengan memberikan alasan yang mendasar dan mengusulkan pilihan lainnya. Hal ini dapat mencakup masalah persetujuan politik hingga pembagian kekuasaan, dan perlu disertai dengan sebuah kampanye informasi

bagi para multiplikator. Penutupan pasar juga terjadi apabila pemerintah dalam tingkat mana pun juga menarik diri dari sebuah kegiatan yang sebelumnya dijalankan oleh negara. Sebagai contoh adalah program privatisasi. Fakta bahwa korupsi meningkat dalam proses-proses semacam ini memperjelas tidak adanya strategi dalam langkah-langkah pelaksanaannya, yang dalam berbagai kasus juga telah memprediksikan seluruh proses.

Kedua strategi di atas tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja dalam sebuah pertarungan politik. Strategi ofensif justru lebih banyak dilakukan oleh partai-partai di luar parlemen atau partai-partai baru. Sementara strategi defensif justru lebih sering digunakan oleh partai yang berkuasa atau di dalam parlemen, yang bertujuan untuk mempertahankan konstituen mereka.

Kaitannya dengan strategi politik, penulis berpendapat bahwa strategi partai politik adalah cara atau upaya yang harus dilakukan oleh partai politik untuk memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya dari calon konstituen. Oleh karena itu, cara yang dimaksud adalah dengan melaksanakan atau memaksimalkan fungsi partai politik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat adanya partai politik. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya diimplementasikan menjelang Pemilu, tetapi juga pasca Pemilu. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah partai politik cenderung meninggalkan konstituennya di saat kekuasaan telah diraih sehingga timbul kecurigaan dalam masyarakat terhadap perjuangan partai politik.

PK Sejahtera sendiri mengartikan strategi sebagai rencana kerja yang terinci, terpadu, dan terorganisir yang mempertimbangkan sumber daya manusia dan material yang dimiliki serta keberadaan kompetitor dan lingkungan yang terus berubah untuk diarahkan sedemikian rupa sehingga berujung pada keberhasilan mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan.<sup>20</sup> Menyangkut strategi Partai PK Sejahtera pada Pemilu 2004, terdapat strategi yang bersifat makro (*grand-strategy*) yang dijalankan oleh semua struktur partai dari pusat sampai daerah. Model strategi ini merupakan keputusan bersama yang menjadi dasar-dasar atau pedoman bagi semua struktur partai tanpa terkecuali. Kewenangan hanya diberikan oleh pusat terhadap daerah dalam kerangka penyesuaian-penyesuaian situasi politik yang berubah ataupun berkembang di dalam masyarakat. Jika terdapat perubahan-perubahan yang bersifat prinsipil maka kewenangan tersebut tetap menjadi hak pusat untuk meninjau kembali penerapan strategi. Terdapat hal yang sangat prinsipil yang menjadi dasar PKS dalam berstrategi, yaitu tetap pada prinsip berpartai yang menjadikan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

## 2. Tipologi Partai Politik

Suatu tipologi partai dan sistem kepartaian mestinya didasarkan pada sumber dukungan partai, organisasi internal, fungsi yang dilakukan, dan cara-cara bertindak.<sup>21</sup> Pertanyaan penting yang harus dijawab sebelum membicarakan tipologi partai politik adalah apakah sebenarnya pengertian

---

<sup>20</sup> (Arsip lajnah kemenangan pemilu PKS 2004)

<sup>21</sup> Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1996), hlm. 30.

partai politik? Fungsi-fungsi apa saja yang melekat pada partai politik? Jawaban atas pertanyaan ini adalah suatu keharusan mengingat untuk memahami tipologi partai politik maka terlebih dahulu harus memahami pengertian dan fungsi partai itu sendiri.

Dalam pasal 1 UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik, pengertian partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan, kehendak, dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan, anggota, masyarakat bangsa dan negara melalui Pemilu. Lapalombara dan Weiner<sup>22</sup> mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang berkesinambungan, artinya masa hidupnya tidak tergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pemimpinnya. Oleh karena itu, menurut keduanya, ciri partai politik berakar pada masyarakat lokal, memerlukan kegiatan terus-menerus untuk berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan dan ikut serta dalam Pemilu.

Benang merah dari kedua pengertian di atas, partai politik adalah suatu aktivitas yang berorientasi untuk memperoleh kekuasaan dan mempergunakannya demi kepentingan publik/ masyarakat.

Adapun fungsi partai politik pada umumnya terdiri dari: sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana komunikasi politik, sarana artikulasi dan agregasi kepentingan, sarana partisipasi politik, sarana pengatur konflik, sarana pembuat kebijaksanaan, dan sarana pengkritik rezim yang

---

<sup>22</sup>Lapalombara dan weiner, dalam Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia widia sarana Indonesia, 1992), hlm. 114.

berkuasa, melaksanakan fungsi input dari sistem politik, membuat dan mengontrol aktivitas pemerintahan, serta *regulator* konflik dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam konteks Indonesia, perdebatan tentang batasan-batasan tipologi partai politik masih menjadi diskusi menarik di antara para pakar politik Indonesia. Tipologi partai politik adalah pengklasifikasian partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial, dan tujuan. Maurice Duverger<sup>24</sup> mengajukan dua tipe partai politik baik yang berdasarkan struktur organisasi maupun berdasarkan tujuan dan ideologi politiknya, yaitu partai elit atau partai tradisional (*partie de cadres*) dan partai massa (*partie de masses*)

Tentang partai elit, Maurice kemudian membaginya ke dalam dua tipe, yaitu konservatif dan liberal. Keanggotaan partai kader yang konservatif terdiri dari kaum aristokrat, industrialis besar, banker, dan agamawan. Sedangkan keanggotaan partai liberal terdiri dari kaum pedagang, industrialis menengah, pegawai pemerintah, pengacara, wartawan, dan penulis. Partai jenis ini tidak bertujuan untuk mendapatkan anggota sebanyak mungkin, tetapi lebih menekankan pada upaya memperoleh dukungan dari orang-orang terkemuka, lebih memperhatikan kualitas daripada kuantitas. Partai ini mencari orang-orang terkemuka demi prestise yang diharapkan dapat mewarnai partai itu dengan pengaruh moral tertentu yang dimiliki. Atau,

---

<sup>23</sup>Riswanda Imawan *Kumpulan Tulisan Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Sistem Pemerintah Indonesia*, PPs.MAP.UGM. 2004.hlm 90.

<sup>24</sup>Maurice Duverger, *Partai politik dan kelompok penekan*, (Yogyakarta: Bina aksara,1984), hlm. 6.



karena kekayaan orang-orang tersebut yang bisa memungkinkan partai tersebut mendapat bantuan biaya kampanye.<sup>25</sup> Sedangkan partai massa menurut Duverger mempunyai ciri-ciri rekrutmen anggota tampak sebagai kegiatan yang fundamental. Dari sudut politik, kuantitas anggota merupakan hal yang penting dalam proses pendidikan rakyat. Semakin banyak jumlah anggota partai, semakin banyak orang yang bisa dipengaruhi melalui pendidikan politik. Dukungan keuangan dari partai politik diperoleh dari massa anggota, bukan dari kalangan elit. Partai massa mengambil alih peran pendanaan oleh kaum kapitalis dalam kegiatan pemilihan sehingga tercipta pola pendanaan keuangan partai yang demokratis.

Sejalan dengan pendapat diatas, Evans<sup>26</sup> mengatakan bahwa menurut kaum elit, loyalitas pribadi dan identifikasi kepada pimpinan nasional partai dianggap kurang penting ketimbang keterikatan pada sebuah proses politik atau posisi kebijaksanaan. Orang-orang ini berusaha menilai para pemimpin dan partai mereka melalui tindakan-tindakan dan kebijaksanaannya ketimbang perilaku simbolis. Mereka juga lebih cenderung memiliki visi yang lebih internasionalis dalam pendekatan untuk menangani persoalan-persoalan secara aktif. Sedangkan dari golongan populis (massa), hubungan dengan pemimpin nasionalis partainya bersifat lebih emosional, bahkan mistis melalui jaringan kepemimpinan lokalnya sendiri.

---

<sup>25</sup>Duverger, Partai Politik dan Kelompok..., *Ibid*, hlm. 7.

<sup>26</sup>Kevin Raimond Evans, *Sejarah pemilu dan partai politik di Indonesia*, (Jakarta: P.T.Arise Consultancies, 1997), hlm. 10.

Sementara itu, menurut Martin Lipset dan S.Rokan,<sup>27</sup> partai politik muncul karena adanya pemilahan sosial dan pengelompokan yang memiliki identitas sendiri yang mengarah pada afiliasi politik yang sama. Partai massa dibentuk dari bawah, dan bergerak secara pasti dari bawah ke atas dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ke dalam proses politik. Partai massa bukan lagi dibentuk atas keinginan para bangsawan, melainkan muncul dari luar parlemen ketika kekuasaan para bangsawan atau raja mulai dikecam dan dibatasi. Timbul keinginan masyarakat bawah untuk melibatkan diri dalam proses politik sebagai sesuatu yang sangat mendesak. Selain itu, partai massa mempunyai aturan yang kuat, memiliki anggota yang relatif formal serta tersentralisasi, disiplin, sangat oligarkis, dan pimpinannya lebih terpusat.

Pengertian partai kader dan partai massa juga disampaikan oleh Peter Schroder.<sup>28</sup> Partai kader menurut Schroder adalah partai yang dapat dikenali berdasarkan organisasinya yang kuat, juga karena mereka termasuk kader/ kelompok orang terlatih yang anggotanya terbatas, berpegang pada ideologi tertentu dan terus-menerus melakukan pembaruan melalui sebuah regenerasi yang berkesinambungan. Sedangkan partai massa adalah partai dengan jumlah anggota yang besar dan banyak. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan kekuatan yang cukup besar untuk dapat membuat terobosan dengan memengaruhi pemerintah dan masyarakat. Mengenai tipologi partai kader dan partai massa, Riswanda Imawan menyatakan bahwa tipologi partai politik ke

---

<sup>27</sup>Riswanda Emawan dan I Ketut putera erawan, Kumpulan tulisan Hubungan..., *Ibid*, hlm. 200.

<sup>28</sup>Schroder, *Strategi Politik...*, hlm. 300.

dalam bentuk partai kader dan massa adalah model tipologi berdasarkan komposisinya. Partai kader adalah partai politik yang lebih mementingkan kualitas dan disiplin organisasi yang tinggi, situasi masyarakat bisa dilihat dari tingkat pendidikannya yang tinggi, budaya partisipan, pemimpin rasional, dan berorientasi pada pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam tipologi model ini, partai bersifat eksklusif, *platform* partai sangat jelas, dan nasib partai tergantung pada struktur dan mekanisme. Partai massa lebih mementingkan kualitas dan mobilisasi dalam jumlah besar, situasi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, budaya politik parokial, dan menampilkan model kepemimpinan kharismatik. Dalam tipologi model ini, partai bersifat inklusif, *platform* partai tidak jelas, dan nasib partai bergantung pada pemimpinnya.

Menurut Were dan Walinets,<sup>29</sup> upaya untuk menjelaskan tipe partai dapat dilakukan dengan membagi partai berdasarkan seberapa besar pendukung, keterlibatannya, dan peran negara terhadap partai. Dengan menggunakan acuan ini, dapat dibagi tipe partai menjadi 6 jenis:

- 1) Partai massa yang berorientasi pada pemimpin (*leader oriented mass party*), yaitu jika tingkat keterlibatan pendukung dalam pemilihan pimpinan, pengorganisasian, dan penentuan kebijakan partai rendah.
- 2) Partai massa (*mass party*), yaitu jika tingkat keterlibatan pendukung dalam pemilihan pimpinan, pengorganisasian, dan penentuan kebijakan tampak tinggi.

---

<sup>29</sup>Erawan, Kumpulan Tulisan Hubungan..., hlm. 656.

- 3) Partai kader klasik (*classic cadre party*), yaitu jika tingkat keterlibatan pendukung dalam pemilihan pimpinan, pengorganisasian, dan penentuan kebijakan tampak rendah.
- 4) Partai kader modern (*modern cadre party*), yaitu jika tingkat keterlibatan pendukung dalam pemilihan pimpinan, pengorganisasian, dan penentuan kebijakan tampak tinggi.
- 5) Partai *cath-all*, yaitu partai yang lebih mengutamakan logika kemenangan Pemilu daripada logika kepentingan pendukung utama.
- 6) Partai kartel, yaitu *cath-all* yang menggunakan kekuatan negara untuk membantu mereka memenangkan Pemilu serta menggunakan berbagai upaya untuk menghambat partisipasi dan keterlibatan partai lain.

Dengan menggunakan pendekatan di atas, jelas terdapat banyak perspektif untuk melihat partai politik. Terkait dengan PK Sejahtera, penulis mengklasifikasikan partai ini ke dalam tipe partai kader modern.

### 3. Basis Sosial Partai

Almond<sup>30</sup> mengatakan bahwa partai politik bisa dibedakan menurut basis sosialnya, yaitu terdiri dari:

- 1) Partai politik yang berasal dari lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah.
- 2) Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok kepentingan tertentu, seperti kelompok petani, buruh, pengusaha, dan sebagainya.

---

<sup>30</sup>Gabriel Almond, dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...*, hlm. 123.

- 3) Partai politik yang berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, budaya, dan daerah tertentu.

Basis-basis sosial di atas merupakan elemen dasar bagi terbentuknya partai politik. Basis pembentukan partai politik bisa juga berdasarkan pada kesamaan ideolog yang dipahami oleh kelompok-kelompok tertentu. Akan tetapi, pada kenyataannya, kebanyakan partai politik tidak hanya memiliki basis sosial dari kalangan tertentu, tetapi terdiri dari berbagai basis sosial.

#### **4. Teori Persaingan Partai**

Teori ini pertama kali disampaikan oleh Anthony Downs dalam bukunya *An Economic Theory of Democracy*.<sup>31</sup> Downs mengatakan bahwa partai-partai yang bersaing meraih suara, memajang dirinya lewat kebijakan-kebijakan ataupun rencana strategis yang mencakup berbagai alternatif di sepanjang kontinum kiri-kanan, mencoba memanfaatkan usulan-usulan kebijakan itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada konsentrasi pemilih terbanyak. Para pemilih menunjukkan preferensinya dengan memberikan suaranya kepada partai yang posisinya dalam kontinum itu paling dekat dengan posisi mereka. Downs mensyaratkan bahwa partai-partai memiliki keluwesan kebijakan atau mobilitas untuk bergerak ke kiri dan ke kanan, sejalan dengan dugaan keuntungan pemilu yang terlihat terutama pada pencapaian target suara Downs beranggapan bahwa partai bisa dengan mudah menempatkan diri di titik mana pun dalam kontinum itu.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Anthony Downs dalam Hans Deter Klingeman, *Partai Kebijakan dan Demokrasi* (Terj.), (Yogyakarta: Jentera Pustaka Pelajar; 2000), hlm. 40.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

Di samping perspektif bergerak bebas yang disampaikan Downs di atas, kecenderungan partai politik untuk bergerak ke tengah juga sangat besar, justru karena posisi tengah inilah yang lebih mencerminkan banyak pemilih. Beberapa alasan partai politik bergerak ke tengah adalah karena: *expand social basis, expand material basis, expand ideologi, expand network*.<sup>33</sup> Oleh karena itu, dalam banyak kasus, pergerakan partai ke tengah justru semakin banyak dilakukan. Hal ini karena dalam banyak kasus membuktikan bahwa bergerak ke tengah justru akan meraih suara atau akan mendapat dukungan yang luas.

PK Sejahtera dapat diteropong dengan menggunakan teori ini, yaitu berada pada posisi kontinum sebelah kanan, yang kemudian secara perlahan, tetapi pasti, bergerak menuju ke tengah. Pergerakan ke tengah dapat dibaca dengan melihat adanya perluasan basis sosial PK Sejahtera dari golongan Islam terdidik ke golongan-golongan lain di luarnya. Perolehan suara PK Sejahtera pada Pemilu 2004 bisa dibaca sebagai titik awal dalam rangka perluasan basis sosial partai.

Di samping adanya perluasan basis sosial, PKS juga secara nyata melakukan perluasan jaringan ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan partai yang melibatkan pihak-pihak di luar partai. Kerja sama-kerja sama pun aktif dilakukan oleh partai ini dalam rangka perluasan jaringan. Langkah ini menurut penulis merupakan sebuah simbiosis mutualisme karena selain mempromosikan partainya dalam kegiatan-kegiatan

---

<sup>33</sup>Erawan, *Kumpulan Tulisan Hubungan...*, hlm. 40.

yang berhubungan dengan masyarakat, juga menguntungkan partai karena jaringannya justru bertambah luas. Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah komitmennya yang kuat terhadap Islam sehingga perluasan jaringan yang dilakukan juga tetap menempatkan Islam sebagai ideologi yang dianut.

### **PKS: Gugatan terhadap Teori Tipologi Partai**

Dengan menggunakan berbagai perspektif teoretis tentang tipologi partai politik, penulis mengklasifikasikan PK Sejahtera ke dalam tipologi partai kader modern. Akan tetapi, upaya klasifikasi ini tidak serta merta membuat PK Sejahtera hanya berada pada klasifikasi tersebut. Terdapat beberapa ciri atau prinsip dasar berpartai yang justru sangat berbeda dengan klasifikasi yang ada. Maurice Deverger misalnya, menyatakan bahwa salah satu ciri partai kader adalah partai yang merupakan kumpulan orang-orang terkemuka yang disegani oleh masyarakat. Jika dilihat secara kritis, aktivis atau pengurus PKS adalah orang-orang baru yang tidak banyak dikenal, bahkan tidak mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Kemudian ciri yang berkaitan dengan partai massa, seperti disampaikan Duverger, adalah dukungan keuangan partai massa diperoleh dari massa anggota partai, bukan dari elit. Partai massa mengambil alih peran pendanaan oleh kaum kapitalis dalam kegiatan pemilihan sehingga tercipta pola pendanaan keuangan yang demokratis. PK Sejahtera justru sebaliknya, pendanaan partai justru berasal dari sumbangan anggota partai, bahkan oleh simpatisan partai. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan partai yang dilakukan oleh PK Sejahtera. Galibu, atau Gerakan Lima Ribu,

merupakan sebuah bukti nyata peran serta anggota dan simpatisan partai dalam rangka mensukseskan kegiatan-kegiatan partai. Selain itu, banyak kegiatan partai yang justru didanai oleh para anggota dan simpatisan partai. Sedangkan partai massa justru sebaliknya, dukungan keuangan justru berasal dari kalangan elit partai. Hal ini merupakan sebuah antitesis terhadap teori yang disampaikan oleh Duverger, dalam kaitannya keberadaan PK Sejahtera sebagai partai kader (modern).

Hal lain yang tidak ditemukan dalam teori tentang partai politik adalah tentang tipologi partai "dakwah" yang dianut PK Sejahtera. Masalahnya adalah belum ada teori tentang tipologi partai dakwah yang menjadi karakteristik PK Sejahtera. Partai dakwah, menurut versi PK Sejahtera, lahir dari adanya filosofi berpartai, yaitu jati diri partai dan manifesto partai. Dari dua hal tersebut jelas bahwa filosofi PK Sejahtera terbentuk berdasarkan konsep tarbiyah. Konsep tarbiyah menurut PK Sejahtera bisa ditinjau dari beberapa aspek: epistemologi tarbiyah berarti pendidikan, tarbiyah oleh kader partai dimaknai sebagai pendidikan formal, yaitu mendirikan sekolah-sekolah formal maupun informal, yaitu pembinaan. Dalam konsepsi partai, tarbiyah adalah inti dari segala aktivitas atau semua kegiatan yang memiliki nilai pembinaan atau pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas keislaman. Bagi kader partai, tarbiyah "bukanlah segala-galanya", melainkan "segala-galanya bisa diraih melalui tarbiyah dan pemaknaan terhadap syari'at Islam". Dengan demikian, landasan filosofi PK Sejahtera adalah terbentuknya cara



pandang Islami terhadap langkah-langkah berjenjang bagi pencapaian cita-cita dakwah Islamiyah.

Hal yang perlu dicermati lebih jauh adalah menyangkut posisi PKS. Posisi partai dalam perspektif PK Sejahtera adalah berpartai bukanlah kelanjutan logis dari kehendak untuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan politik, melainkan kelanjutan dari dakwah Islamiyah. Mendirikan partai politik sama dan sebangun maknanya dengan memasuki dimensi politik sebagai bagian dari dakwah Islamiyah. Tujuan luhur dari semua ini adalah aktualisasi universalitas Islam dalam rangka mewujudkan keseimbangan hidup manusia dan masyarakat dalam berbagai dimensinya. Partai politik kemudian berperan sebagai kekuatan alternatif terhadap perjuangan politik kaum muslimin dalam mengemban tugas dakwah. Inilah yang menjelaskan mengapa PK Sejahtera mendeklarasikan dirinya sebagai partai dakwah. PK Sejahtera yang menempatkan Islam sebagai ideologi partai, dalam aktivitasnya sangat konsisten menjadikan Islam sebagai pedoman dan napas dalam setiap langkah dan pergerakan kadernya. Basis Islam sangat terasa jika berinteraksi dengan para kader dan simpatisan partai. Hal itu pula yang tampak dalam setiap pernyataan-pernyataan dan tingkah laku kadernya.

Kaitannya dengan tipe partai dakwah yang dideklarasikan PK Sejahtera, penting bagi penulis untuk memberikan batasan-batasan yang dapat digunakan untuk memahami lebih jauh tipologi partai dakwah. Penulis mencoba mengklasifikasikan PK Sejahtera ke dalam sebuah tipe yang disebut *partai kader modern berbasis agama*. Asumsi ini dibangun untuk membuktikan

bahwa sebagai partai kader, PK Sejahtera bisa dilihat dalam proses perekrutan anggota baru partai yang dilakukan secara selektif dan ketat. Sedangkan sebagai partai berbasis agama, PK Sejahtera bisa dilihat dari implementasi partai dakwah yang dianut partai, karena konsistensi kader partai dalam menjalankan nilai-nilai Islam dalam berpartai.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif. Penelitian eksploratif bertujuan untuk menggambarkan secara lebih terperinci tentang status keadaan fenomena sosial yang melibatkan manusia sebagai instrumen pengumpulan data.<sup>34</sup>

Deskriptif-eksploratif juga bertujuan untuk mencari fakta-fakta baru yang terdapat di lapangan untuk memperkaya informasi dalam penelitian ini. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan politik. Yakni suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena partai politik yang penulis amati di Kabupaten Kepulauan Sula yang dalam hal ini lebih difokuskan pada PK Sejahtera.

### **a. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. *Person* (Orang)**

Data yang diperoleh langsung dari orang yang menjadi sumber data adalah para *stakeholder* atau informan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, yaitu antara lain:

---

<sup>34</sup>J.Vredenberg, *Pengantar Metodologi Ilmu-Ilmu Empiris*, (Jakarta: P.T.Gramedia, 1985), hlm. 53.

- 1) Unsur pimpinan partai politik/ politisi Islam yang memiliki kursi di DPRD.
- 2) Ketua KPUD, KPK, dan PANWASLU Daerah.
- 3) Pimpinan organisasi Islam, seperti NU dan Muhammadiyah.
- 4) Tokoh-tokoh masyarakat di daerah-daerah yang berbasis Islam dan memiliki kecenderungan memilih partai Islam.
- 5) Organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Islam.

## 2. *Place* (Tempat)

Adapun tempat penelitian diperolehnya data adalah Kantor DPD PK Sejahtera Kabupaten Kepulauan Sula, Kantor KPUD Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kantor DPW PK Sejahtera Propinsi Maluku Utara.

## 3. *Paper*

Studi kepustakaan, di mana data yang diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

Dari ketiga sumber data di atas akan menghasilkan dua jenis data, yaitu:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang relatif lebih subyektif karena terbentuk persepsi pribadi baik yang dilakukan dengan wawancara maupun pengamatan.
- 2) Data sekunder adalah data yang berguna sebagai pemandu karena data ini diperoleh dari dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang relatif lebih obyektif.

## b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap responden dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang memuat pokok-pokok permasalahan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

### 2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui teknik ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang berupa arsip-arsip dan laporan-laporan, termasuk laporan media cetak yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

### c. Teknik Analisis Data

Analisis data pada dasarnya adalah proses perincian atau penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang telah dikumpulkan di lapangan baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif. Adapun langkah-langkah analisis data, antara lain:

- 1) Menganalisis isi dari data primer, di mana data akan dibuat kategori-kategori tertentu berdasarkan keteraturan dan kecenderungan yang dapat ditemukan dari data primer.
- 2) Melakukan analisis isi dari data sekunder.
- 3) Melakukan *cross-check* di antara kedua jenis data.
- 4) Membuat penafsiran secara umum dan komprehensif untuk merumuskan kesimpulan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan, penelitian ini disusun menurut sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II membahas profil Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara serta gambaran umum Partai PKS. Pembahasan tentang profil Kabupaten Kepulauan Sula ditinjau dari sudut geografi, demografi, sosial-budaya, dan politik pemerintahan. Sedangkan tentang gambaran umum Partai PKS membahas nama dan lambang partai, landasan, tujuan, ideologi politik, prinsip kebijakan partai, visi dan misi partai, serta kiprah partai di Kabupaten Kepulauan Sula.

Bab III membahas dasar strategi pemenangan Partai PKS di Kabupaten Kepulauan Sula pada Pemilu Legislatif 2004. Dasar strategi pemenangan ini terdiri dari *positioning* partai PKS, Segmentasi partai, dan *targetting* partai.

Bab IV menyajikan pembahasan tentang implementasi strategi pemenangan PKS pada Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Kepulauan Sula. Bab ini terdiri dari dua pembahasan, yaitu strategi ofensif dan strategi defensif.

Bab V membahas tentang peningkatan perolehan suara PKS pada Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Kepulauan Sula. Bab ini membahas tentang faktor-faktor yang mendukung peningkatan suara, faktor penghambat peningkatan suara, dan prospek PKS di Kabupaten Kepulauan Sula pada masa yang akan datang.

Bab VI berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yang Terhormat  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan, bahwa setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi atas naskah tesis yang berjudul:

**STRATEGI PEMENANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA  
PEMILU LEGISLATIF 2004 (*Studi Di Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi  
Maluku Utara*)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Samad Umarama, S.Ag..  
NIM : 06.234.390.  
Program : Magister  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan guna memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta 03 November 2008  
Pembimbing

Dr. Hamim Ilyas, MA.  
NIP : 150 235 955

## KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

الله رسول محمدا أن وأشهد الاالله لاإله أن أشهد .العالمين رب لله الحمد

:بعد أما .أجمعين واصحابه اله وعلي محمد سيدنا على وسلم صل اللهم

Tiada kata terindah yang patut diucapkan seorang hamba selain syukur kehadiran Allah SWT, yang maha mengetahui, maha luas ilmunya, maha mengatur serta maha segala-galanya. Berkat segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, tesis ini dapat di selesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai dan terwujud dalam bentuk dan isi sebagaimana tersaji, jika tidak ada bantuan dan jasa dari berbagai pihak bagi usaha penyusunannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada Bapak Dr.Hamim Ilyas, M.A. selaku pembimbing, atas segala arahan, bimbingan, saran, kesabaran, perhatian dan waktu yang beliau berikan dan luangkan kepada penulis. Masukan-masukan dari beliau yang amat berharga mempunyai andil besar dalam penyempurnaannya. Ucapan terima kasih juga harus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga. Di sela-sela kesibukan beliau yang menumpuk, masih sudi meluangkan waktu untuk sekedar beramah-tamah lewat meja bundar kelas pasca.
2. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnaen selaku direktur Pascasarjana UIN Sunan kalijaga.
3. Bapak Prof. Dr. H Abd. Salam Arief, M.A. dan Bapak Muhammad Sodiq, S.Sos., M.Si., selaku penasehat akademik sekaligus Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih banyak atas bimbingan dan toleransinya selama ini. Khususnya kepada Bapak Prof. Dr. H Abd. Salam Arief, M.A.terima kasih atas saran dan masukannya yang sangat berharga disaat Tesis ini masih dalam bentuk proposal.
4. Bapak dan ibu dosen dan seluruh staf administrasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terima kasih pula penulis sampaikan pada Ketua STAIN Ternate yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pada program S-2 di UIN Sunan Kalijag Yogyakarta Konsentrasi Stidi Politik dan Pemerintahan dalam Islam. Semoga penghargaan yang diberikan ini dapat

dibalas dalam bentuk pengabdian terhadap daerah dan masyarakat Maluku Utara khususnya dunia pendidikan.

Kawan-kawan angkatan 2006-2007 Studi Politik Dan Pemerintahan Dalam Islam, Mukhtarom, Ridwan, Rahmatullah, Dedeng Alamsyah, Ludyansyah, Zuhri Humaidi, Mukhlis Mubarak Dalimunthe, Najamuddin, Adzani, Hilyatul Auliya, dan Eka Martini kuucap terimakasih dan selamat berbahagia karena kekariban, canda, serta kehangatan persahabatan kalian melengkapi format studiku di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Terimakasih pula kuucapkan kepada ustad Drs.M.Nur Sayuti (ketua Lajnah pemenangan pemilu PKS Kabupaten Kepulauan Sula sekaligus pimpinan pondok pasantren Nurul Bahri) yang bersedia diganggu setiap saat oleh penulis disaat penelitian tesis ini.

Ayahanda tercinta (almarhum), dengan tetesan darah dan keringat tanpa mengenal lelah berupaya siang dan malam mencari nafkah demi kesuksesan anaknya. Ibunda tercinta (almarhum), dengan sentuhan kasih dan sayangnya mendampingi ayahanda mencari nafkah serta mendidik kami (anak-anaknya) dengan penuh kesabaran. Serta kedua adikku Halija dan Jisman (almarhum), semoga Allah Swt mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka dan di terima di tempat yang layak disisiNya. Terimakasih pula kuucapkan kepada kakakku tercinta Jamaludin terutama kakak kadim yang senantiasa mendampingi Ayahanda dan Ibunda siang dan malam mencari nafkah demi membiayai Sekolah adiknya, semoga Allah Swt membalasnya dengan kebaikan yang sempurna. Terimakasih kepada Mama dan Aba (almarhum) serta Tena dan dada yang telah merawatku dari kecil. Mereka semua adalah sumber motivasi dan inspirasi utama bagi penulis. Semoga Allah Swt memberikan rahmat, hidayah, kesehatan serta memberikan jalan yang diridhoiNya kepada mereka dan dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat.

Isteriku tercinta Rusmiyanti Wontami SpdI yang setia menanti serta mendo'akan keberhasilan penulis, secara tulus aba mohon maaf, karena tidak bisa mendampingi hari-hari indah hidup berumahtangga. Insya Allah suka dan duka akan kita jalani bersama selama hidup didunia dan diakhirat. Anak-anakku tersayang, Istiqomah Umarama, Faturrahman Umarama dan sikecil Muhammad Syauki Umarama yang selalu merindukan kasih sayang ayahnya, aba mohon maaf karena tidak mendampingi masa-masa indah kalian, semoga dengan sentuhan kasih dan sayang bunda tercinta kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi metodologi, substansi maupun cara menganalisis untuk itu penulis sangat mengharapkan segala masukan, saran ataupun kajian lebih lanjut untuk kesempurnaannya. Sesungguhnya kesaempurnaan hanyalah milik Allah Swt pencipta alam semesta



Yogyakarta, November 2008

Penulis

Samad Umarama, S.Ag

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	39
G. Sistematika Pembahasan.....	41
 <b>BAB II PROFIL KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROPINSI MALUKU UTARA.....</b>	 <b>43</b>
A. Kabupaten Kepulauan Sula.....	43
B. Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	53
C. Kegiatan Partai PKS di Kabupaten Kepulauan Sula.....	82

**BAB III DASAR STRATEGI PEMENANGAN PKS DI KABUPATEN  
KEPULAUAN SULA PADA PEMILU LEGISLATIF 2004**

a. <i>Positioning</i> PKS.....	87
b. Segmentasi PKS.....	89
c. <i>Targetting</i> PKS.....	94

**BAB IV IMPLEMENTASI STRATEGI PEMENANGAN PKS DI  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA PADA PEMILU  
LEGISLATIF 2004.....**

A. Strategi Ofensif.....	99
B. Strategi Defensif.....	135

**BAB V PENINGKATAN PEROLEHAN SUARA PKS DI KABUPATEN  
KEPULAUAN SULA PADA PEMILU LEGISLATIF 2004**

A. Faktor Pendukung.....	137
B. Faktor Penghambat.....	143
C. Prospek PKS di Kabupaten Kepulauan Sula.....	147

<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>153</b>
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran.....	155

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Samad Umarama, S.Ag.  
Tempat Tanggal Lahir : Wai-ina, 03 September 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
NIP : 150 329 278  
Pangkat/Golongan : ( III/B )  
Pekerjaan : Dosen STAIN Ternate Propinsi Maluku Utara  
Status : Menikah  
Nama Orangtua :  
    Nama Ayah : Ahmad Umarama (Almarhum)  
    Nama Ibu : Juwairia Bilmona (Almarhum)  
    Nama Istreri : Rusmiyanti Wontami, S.Pdi.  
    Nama Anak : Istiqomah Umarama  
                    : Fathurrahman Umarama  
                    : Muhammad Syauqy Umarama  
Pekerjaan Orangtua : Wiraswasta  
Alamat Orangtua : Wai-ina Kec.Sanana Kab. Kep. Sula, Prop. Maluku Utara  
Riwayat Pendidikan : SD Negeri Wai-ina Kec. Sanana Tamat Tahun 1985  
                            Mts. Sanana Lulus Tahun 1988  
                            MA.Sanana. Lulus Tahun 1991  
                            Uninersitas Alkhairaat (UNISA) Palu Lulus Tahun 1996  
                            Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Prodi Hukum Islam  
                            Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam  
                            Masuk Tahun 2006  
Organisasi : HMJ Fak. Syariah Priode 1993-1994, (Ketua).

Yogyakarka, 3 November 2009

Samad Umarama, S.Ag

## ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus sebagai wadah bagi partai politik untuk mengartikulasi dan mengagregasi kepentingannya, untuk itu, strategi merupakan suatu keharusan bagi partai politik dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan politiknya.

PK Sejahtera sebagai partai baru yang belum memiliki basis massa yang kuat pada pemilu legislatif 2004 di Kabupaten Kepulauan Sula, ternyata berhasil memperoleh suara yang signifikan dan menduduki tempat ketiga setelah partai Golkar dan PDIP. Banyak pihak menilai bahwa basis dukungan PK Sejahtera adalah kalangan Islam kota terdidik, ternyata dukungan PK Sejahtera di Kabupaten Kepulauan Sula sebagian besar berasal dari daerah yang tergolong bukan daerah perkotaan dan tingkat pendidikan masyarakatnya tidak terlalu tinggi. Selain itu PK Sejahtera minim dukungan tokoh-tokoh berpengaruh terhadap masyarakat, karena tokoh-tokoh yang telah lama mengakar sudah terserap ke partai-partai besar. PK Sejahtera Kabupaten Kepulauan Sula sebagian besar di dukung oleh kaum muda yang sama sekali baru dalam konfigurasi politik.

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan strategi kemenangan yang ditempuh oleh PK Sejahtera Kabupaten Kepulauan Sula pada Pemilu Legislatif 2004, bagaimana dasar dan implementasi strategi yang ditempuh oleh PK Sejahtera, sekaligus prospeknya di Kabupaten Kepulauan Sula. Teori yang digunakan adalah teori tentang partai politik, dalam arti partai politik sebagai kelompok kepentingan yang dikombinasikan dengan teori persaingan partai yang di kemukakan oleh Anthony Down yang berkaitan dengan elastisitas gerak partai politik

Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif, bertujuan untuk menggambarkan secara lebih terperinci tentang status keadaan fenomena sosial yang melibatkan manusia sebagai instrumen pengumpulan data, sekaligus mencari fakta-fakta baru yang terdapat di lapangan untuk memperkaya informasi dalam penelitian ini. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan politik. Yakni suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena partai politik yang penulis amati di Kabupaten Kepulauan Sula yang dalam hal ini lebih difokuskan pada PK Sejahtera.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan adalah perpaduan dari konsep manajemen pemasaran dengan konsep politik yang disesuaikan dengan karakteristik situasi dan kondisi masyarakat Kepulauan Sula. Yang terdiri dari tahapan perencanaan, meliputi, positioning, segmentasi dan targeting. Yang merupakan penerapan langsung dari Program partai pada Pemilu yang terdiri dari direct marketing, gerilya marketing dan logika menjaring massa. Logika menjaring massa ini meliputi: Logika ketokohan, logika agama/ideologi, logika jaringan, logika pragmatisme, logika sosial budaya. Logika media. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dominasi kemenangan PK Sejahtera adalah selain faktor ketokohan juga termasuk faktor Ideologi. Partai ini pada kenyataannya didukung oleh kaum Muslim dan oleh ketokohan para Ustad dan Da'i yang menjadi kader dan aktifis partai. Kedepan, untuk memperkuat posisi partai di tengah masyarakat yang plural maka langkah kongkrit yang harus diambil adalah dengan menggeser secara bertahap loyalitas kepada tokoh menjadi loyalitas kepada partai. Pergeseran ini bertujuan untuk menumbuhkan loyalitas masyarakat pada partai dan bukan pada tokoh.